

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik yang paling mudah dikenal yaitu organisasi pemerintah. Sebagaimana organisasi publik pada umumnya organisasi pemerintah akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran di dalam organisasi sektor publik terutama pada organisasi pemerintah mempunyai peranan penting. Anggaran di dalam sektor publik biasanya dikatakan sebagai anggaran pemerintahan. Dilihat dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi, sistem penganggaran merupakan alat yang digunakan sebagai pengalokasian sumber daya ke masyarakat dalam bentuk barang dan jasa.

Langkah yang direncanakan pemerintah untuk mengetahui berapakah biaya yang di perlukan, serta berapa hasil yang akan didapatkan dari belanja pemerintah maka dibuatlah anggaran dalam sektor publik. Mardiasmo dalam Halim & Kusufi (2012:22), anggaran yaitu perkiraan kinerja yang akan di peroleh pada waktu yang sudah ditentukan dan dapat dinyatakan dalam ukuran finansial. APBN serta APBD yaitu wujud dari suatu anggaran sektor publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam Ritonga (2009 : 183) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas serta di setuju bersama oleh pemerintah daerah serta di tetapkan dengan peraturan daerah. APBD digunakan oleh pemerintah daerah yaitu sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pengeluaran dana masyarakat dalam melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Komponen APBD tersusun dalam suatu struktur APBD, struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai denan peraturan perundang-undangan.

Laporan realiasi anggaran (LRA) adalah laporan keuangan paling pertama dihasilkan. Informasi LRA di publikasikan oleh pemerintahan daerah dapat digunakan dalam menilai suatu kinerja keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, selama belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam kegiatan mengelola keuangan daerah dalam mencapai suatu tujuan yang sudah di tetapkan disebut dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan LRA, kita dapat melakukan suatu analisis laporan keuangan yaitu analisis pendapatan. Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Relisasi pendapatan daerah akan di nilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah.

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pada Diskominfo Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2018 yaitu diantaranya. *Pertama*, realisasi anggaran pendapatan daerah pada Diskominfo Kota Bandung belum dapat mencapai target yang ada. Tabel di bawah ini yang merupakan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari LRA Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2018.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung**  
**Tahun 2016 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2016	Pendapatan Daerah	3.300.066.000.00	0.00	0.00
	Pendapatan Asli Daerah	3.300.066.000.00	0.00	0.00
2017	Pendapatan Daerah	3.300.066.000.00	0.00	0.00
	Pendapatan Asli Daerah	3.300.066.000.00	0.00	0.00
2018	Pendapatan Daerah	3.000.000.000.00	1.905.435.000.00	63,51
	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000.000.00	1.905.435.000.00	63,51

Sumber: LRA Diskominfo Kota Bandung 2016-2018 (diolah peneliti) 2020.

Tabel diatas merupakan data realisasi anggaran pendapatan Diskominfo tahun 2016 - 2018. Terlihat pada di tahun 2016, realisasi Anggaran pendapatan daerah yakni Rp.0.00 atau 0,00% dari anggaran yang telah di tetapkan Rp.

3.300.066.000,00, kemudian di tahun 2017 Realisasi anggaran pendapatan daerah juga tidak mengalami peningkatan yaitu Rp. 0.00 atau 0,00 % , dan pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar Rp. 1.905.435.000,00 tapi hanya berkisar 63,51%.

*Kedua*, terdapat selisih anggaran pendapatan yang terjadi selama tiga tahun anggaran yaitu tepatnya pada tahun anggaran 2016-2018 . *Ketiga*, pada tahun 2016 dan 2017 tidak terjadinya realisasi anggaran pendapatan sehingga menyebabkan tidak terjadi pertumbuhan pendapatan di tahun tersebut. *Keempat*, teori tentang pendapatan daerah terutama realisasinya sangat perlu diperhatikan karena sesuai dengan teori dalam Mahmudi (2016:151) di jelaskan bahwa dengan dengan melakukan analisis pendapatan maka dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. *Kelima*, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli pada suatu daerah, PAD pada Diskominfo kota bandung tahun anggaran 2016-2018 pada realisasinya belum tercapai atau melampaui target anggaran.

Melalui Laporan Realisasi Anggaran Diskominfo Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 - 2018, peneliti melakukan analisis pendapatan daerah yaitu ditinjau dari analisis (varians) selisih anggaran, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, efektivitas dan efisiensi PAD. Dengan melakukan analisis pendapatan daerah maka dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam merealisasikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016-2018. Berdasarkan permasalahan dan

latarbelakang yang di uraikan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016 - 2018”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah realisasi pendapatan daerah Diskominfo Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 2018 belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas,maka rumusan masalah yang penulis ambil yaitu bagaimana analisis pendapatan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2018, ditinjau dari analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pendapatan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun Anggaran 2016-2018, ditinjau dari analisis varians (selisih) anggaran pendapata, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah?

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi di dalam memberikan informasi, baik itu secara empiris maupun teoritis kepada pihak-pihak yang melaksanakan suatu penelitian dan juga sebagai pelengkap sumber kepustakaan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat dijadikan penguatan dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta menambah pengalaman dan wawasan peneliti mengenai pendapatan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, serta mengetahui bagaimana melakukan analisis pendapatan daerah.

#### **b. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, memberikan manfaat, serta bahan evaluasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan pada bidang kajian yang sama untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia konsep dari administrasi publik ini telah ada dari dulu, istilahnya saja yang diganti dari administrasi publik menjadi administrasi negara oleh para pakar (Pasolong, 2011:3-6). Pembahasan mengenai administrasi publik tentunya tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Henry dalam Pasolong (2011 : 6) mendefinisikan administrasi publik yaitu :

“Sebagai perpaduan yang bertautan antara praktik dengan teori bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat yang di perintah serta mendorong kebijakan publik menjadi lebih tanggap terhadap kebutuhannya.”

Ruang lingkup administrasi publik akan semakin kompleks yaitu tergantung pada perkembangan kebutuhan serta dinamika suatu masalah yang di hadapi oleh masyarakat. Chandler dan Plano dalam Maksudi (2017) mengatakan bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks, maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Menurut Mamesa dalam Halim & Iqbal (2012:24), keuangan daerah merupakan:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan barang maupun uang yang dapat dijadikan kekayaan didaerah, sepanjang belum dimiliki oleh negara ataupun daerah yang lebih tinggi serta pihak lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Hak merupakan hak untuk mencari sumber pendapatan daerah seperti melakukan pemungutan sumber sumber penerimaan daerah yaitu meliputi retribusi daerah, pajak, serta hak di dalam memperoleh beberapa sumber penerimaan

lainnya .Sedangkan kewajiban yaitu kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah daerah.

Terdapat tiga tahap siklus pengelolaan keuangan daerah yaitu tahapan perencanaan, pada tahap ini terdapat tiga bagian yaitu yang pertama adalah input yaitu berupa dokumen perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah; kedua adalah proses yang tentunya harus dilakukan sehingga akan menghasilkan output perencanaan yaitu berupa dokumen perencanaan daerah; dan ketiga yaitu output dari tahapan perencanaan ini yaitu berupa RAPBD;

Implementasi, pada tahapan ini terdapatnya suatu proses yaitu berupa sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu suatu hal yang sangat penting karena meskipun perencanaan anggaran itu baik tetapi pada tahap implementasinya tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai maka hal ini akan menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diinginkan;

dan terakhir yaitu Pelaporan serta pengevaluasian hasil kerja. Output yang dihasilkan pada tahapan pelaksanaan yakni laporan pelaksanaan anggaran maka ini menghasilkan input pada tahapan ini. Dan input tersebut akan diproses dan akan menghasilkan output yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Pendapatan yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dengan diberikannya hak; wewenang; serta kewajiban pada suatu daerah hal ini dimaksudkan agar daerah tersebut dapat mengatur serta mengurus rumah tangga

nya sendiri, hal ini dilakukan sebagai suatu upaya dalam meningkatkan peran serta pemerintahan daerah dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, dengan mengelola sumber pendapatannya secara efisien dan juga efektif, terkhusus pendapatan asli daerah (PAD) nya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber sumber wilayahnya sendiri yang kemudian dalam pemungutannya di dasarkan pada peraturan daerah (Perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Dalam mengetahui suatu informasi yang dipergunakan di dalam menilai kinerja keuangan pada suatu daerah, dapat kita lihat pada laporan realisasi anggaran yang telah dipublikasikan.

Sebelum diisyratkan membuat suatu laporan neraca dan arus kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah jenis pada laporan keuangan daerah yang paling pertama dihasilkan. Dengan Laporan Realisasi Anggaran bisa dilakukan analisis pada laporan keuangannya tersebut yaitu seperti analisis pendapatan; belanja; dan pembiayaan. Analisis pendapatan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

### 1.7 Proposisi

Analisis pendapatan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung di dalam pelaksanaannya akan baik, jika hasil analisisnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam setiap analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah.